

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Distribusi Data

4.1.1 Data dan Sampel

Penelitian ini mengambil sampel para pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu:

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

No	SKPD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	5
2	Dinas Lingkungan Hidup	5
3	Satuan Polisi Pamong Praja	5
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4
5	Badan Kepegawaian Daerah	5
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
9	Dinas Tenaga Kerja	5
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	5
11	Dinas Pariwisata	5
12	Dinas Pekerjaan Umum	5
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5
14	Dinas Pengendalian Penduduk	5
15	Dinas Pangan	5
16	Dinas Perhubungan	5
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4
18	Dinas Perindustrian	5
19	Dinas Sosial.	5
Jumlah		93

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan selama bulan Februari 2018, berhasil dikumpulkan kembali jawaban kuesioner yang diisi lengkap sebanyak 93 kuesioner. Adapun ikhtisar dan pengembalian kuesioner pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Distribusi Kuesioner	100	100 %
2	Kuesioner Tidak Diisi	7	7 %
3	Kuesioner Yang Diolah	93	93 %
N Sampel = 93			
Responden Rate = $(93/100) \times 100\% = 93 \%$			

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Dari 100 kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali dan diisi secara lengkap hanya 93, dan ada 7 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap.

Berdasarkan data yang dihimpun dari 93 responden tersebut, maka dapat disajikan informasi umum tentang responden yaitu, jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama kerja dapat dilihat pada tabel 4.3, 4.4, dan 4.5, serta tabel 4.6, sebagai berikut.

4.1.2. Deskripsi Responden

Para responden yang melakukan pengisian kuesioner kemudian akan diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama kerja. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik secara umum para responden penelitian. Tabel berikut Menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	34	36,56 %
Wanita	59	63,44 %
Jumlah	93	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.3 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari pegawai berjenis kelamin wanita berjumlah 59 orang atau 63,44 persen, sedangkan pria dengan jumlah 34 orang atau 36,56 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 tahun	6	6,45 %
25 – 35 tahun	46	49,46 %
36 - 45 tahun	30	32,26 %
> 45 tahun	11	11,83 %
Jumlah	93	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.4 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari pegawai dengan usia 25 – 35 tahun berjumlah 46 orang atau 49,46 persen, responden lainnya berusia 36 - 45 tahun dengan jumlah 30 orang atau 32,26 persen, dan sisanya responden berusia lebih dari 45 tahun dan berusia kurang dari 25 tahun masing-masing 11 orang dan 6 orang atau 11,83 persen dan 6,45 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
SMA/Sederajat	6	6,45 %
D3	10	10,75 %
S1	60	64,52 %
S2	17	18,28 %
Jumlah	93	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.5 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari pegawai berpendidikan S1 dengan jumlah 60 orang atau 64,52 persen, kemudian berpendidikan S2 berjumlah 17 orang atau 18,28 persen, selanjutnya berpendidikan D3 berjumlah 10 orang atau 10,75 persen. Sedangkan berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 6 orang atau 6,45 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan lama kerja dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Data Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Kerja	Jumlah	Persentase
< 5 tahun	4	4,30 %
5 – 10 tahun	41	44,09 %
11 – 15 tahun	30	32,26 %
16 – 20 tahun	10	10,75 %
> 20 tahun	8	8,60 %
Jumlah	93	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.6 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari pegawai dengan masa kerja 5 – 10 tahun berjumlah 41 orang atau 44,09 persen, kemudian responden dengan masa kerja 11 – 15 tahun sebanyak 30 orang atau 32,26 persen, lalu responden dengan masa kerja 16 – 20 tahun dan lebih dari 20 tahun masing-masing berjumlah 10 dan 8 orang atau 10,75 dan 8,60 persen. Sedangkan jumlah terkecil responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 4 orang atau 4,30 persen.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Statistik Deskriptif

Dari sembilan puluh tiga data tersebut dilakukan olah data secara statistik deskriptif dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	93	10	16	13.18	1.641
Kejelasan Sasaran Anggaran	93	15	25	20.52	2.067
Pengendalian Akuntansi	93	10	16	13.16	1.555
Penerapan Akuntansi Publik	93	9	16	12.74	1.510
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	93	8	13	10.17	1.537
Sistem Pelaporan	93	12	22	15.68	2.242
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

dari tabel di atas untuk masing – masing variabel yaitu: untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diketahui total skor jawaban maksimum adalah 16, dan jawaban terendah 10, sedangkan rata-rata jawaban adalah 13,18, untuk variabel kejelasan sasaran anggaran diketahui total skor jawaban maksimum adalah 25 dan jawaban terendah 15, sedangkan rata-rata jawaban adalah 20,52, untuk variabel pengendalian akuntansi diketahui total skor jawaban maksimum adalah 16 dan jawaban terendah 10, sedangkan rata-rata jawaban adalah 13,16, serta untuk variabel penerapan akuntansi publik diketahui total skor jawaban maksimum adalah 16, dan jawaban terendah adalah 9 sedangkan rata-rata jawaban adalah 12,74. Selanjutnya untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan diketahui total skor jawaban maksimum adalah 13, dan jawaban terendah adalah 8, sedangkan rata-rata jawaban adalah 10,17. Kemudian untuk variabel sistem pelaporan diketahui total skor jawaban maksimum adalah 22, dan jawaban terendah adalah 12, sedangkan rata-rata jawaban adalah 15,68.

4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.2.1 Uji Validitas

Menurut Prayitno (2010:90) uji validitas adalah untuk menguji ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini penulis menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Product Moment Pearson) untuk melakukan pengujian validitas, dengan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Selanjutnya $r \text{ tabel}$ dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data $N = 93$, maka didapat $r \text{ tabel}$ sebesar 0,204. Dan $r \text{ tabel}$ yang didapat tersebut dibandingkan dengan besarnya nilai r hasil perhitungan statistik atau $r \text{ hitung}$ yang dapat dilihat pada masing-masing variabel dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,642	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item2	0,886	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item3	0,857	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item4	0,710	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan $r \text{ hitung}$ *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan $r \text{ tabel}$. Dari output yang diperoleh, 4 item pernyataan dinyatakan valid, karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Jadi dapat

disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah valid.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,773	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,826	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,785	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,751	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item5	0,731	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item6	0,666	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari ouput yang diperoleh, 6 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang kejelasan sasaran anggaran adalah valid.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Pengendalian Akuntansi

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,749	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,776	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,819	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,772	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari ouput yang diperoleh, 4 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat

disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang sistem pengendalian pengendalian akuntansi adalah valid.

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Penerapan Akuntansi Publik

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,793	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,890	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,680	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,682	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 4 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang penerapan akuntansi publik adalah valid.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,900	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,896	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,878	0,204	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 3 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang ketaatan pada peraturan perundangan adalah valid.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,839	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item2	0,726	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item3	0,953	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item4	0,928	0,204	$r \text{ Hitung} > r \text{ Tabel}$	Valid
Item5	0,943	0,204		

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 5 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang sistem pelaporan adalah valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Penulis menggunakan pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha*. Untuk pengujian biasanya batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran dalam buku Priyatno (2010:97), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Hasil pengujian reliabilitas terhadap item-item pertanyaan pada variabel kompensasi, disiplin kerja, dan kinerja dapat dilihat pada output *Reliability Statistics* dari nilai Cronbach's Alpha pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,781	0,60	Reliabel
2	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,849	0,60	Reliabel
3	Pengendalian Akuntansi	0,784	0,60	Reliabel
4	Penerapan Akuntansi Publik	0,764	0,60	Reliabel
5	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0,867	0,60	Reliabel
6	Sistem Pelaporan	0,928	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas diketahui nilai Cronbach's Alpha rata-rata diatas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.2.3. Analisis SEM

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai *Fit Model* dari sebuah model penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

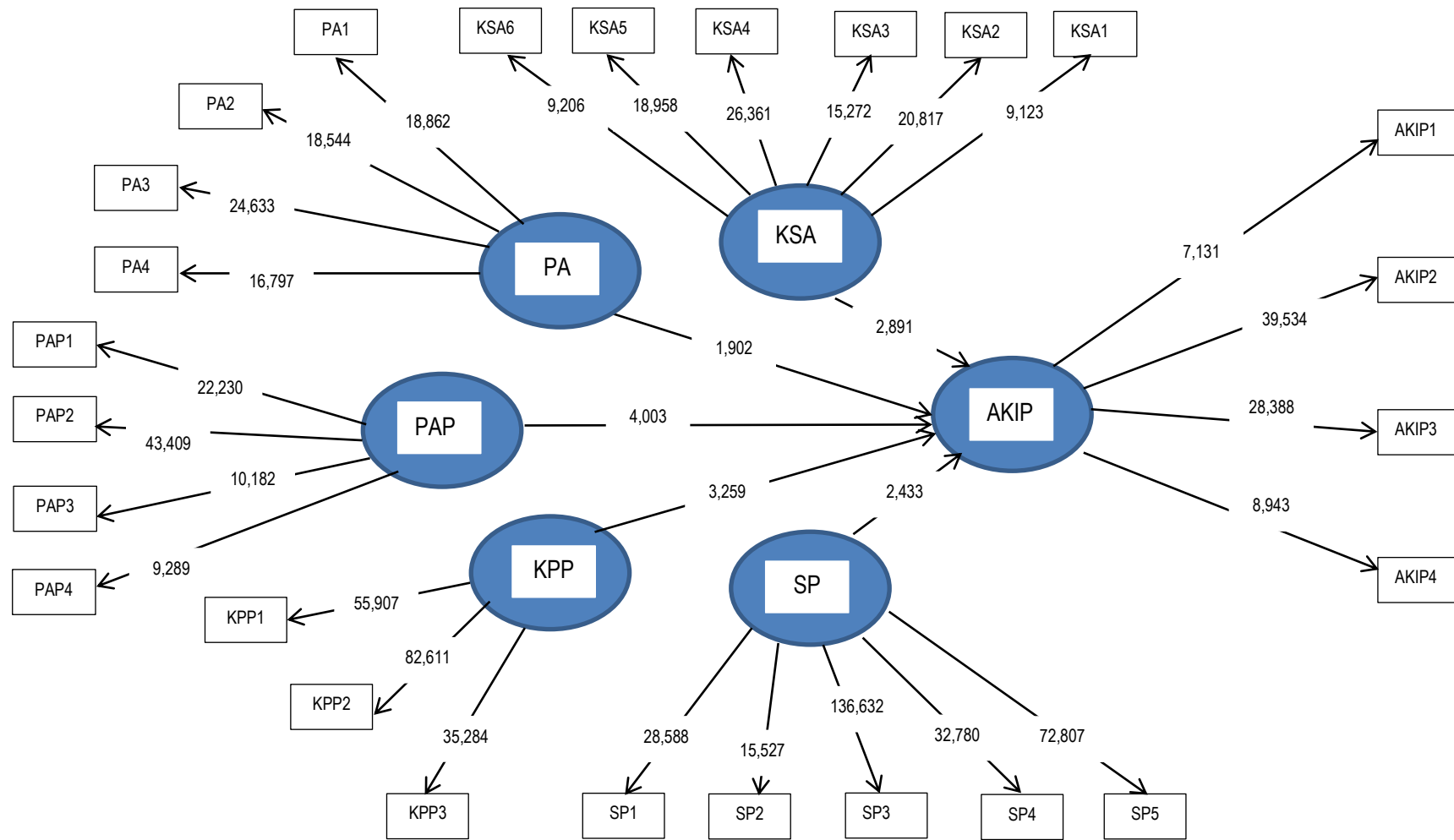
4.2.3.1 Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Di dalam teknik analisa data dengan menggunakan SmartPLS ada tiga kriteria untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score / component score* yang diestimasi dengan Software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan baik jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur

(Hulland, 1999). Namun menurut Chin, 1999 (dalam Ghazali, 2011) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

Dalam penelitian ini variabel yang akan dianalisa menggunakan SmartPLS meliputi variabel independen yang terdiri dari kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan perundangan, dan system pelaporan serta pengaruhnya terhadap variabel devenden yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji terhadap *outer loading* bertujuan untuk melihat korelasi antara *score item* atau indikator dengan score konstruknya. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Untuk lebih jelas hasil pengolahan data dapat dilihat pada gambar berikut ini dengan menggunakan SmartPLS



Gambar 4.1. Nilai Outer Model Original Sampel

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada gambar 4.1. nilai outer model original sampel atau korelasi antara konstruk dengan variabel secara umum sudah memenuhi Convergent Validity (≥ 0.5), Discriminant Validity (Cross Loading \geq Correlations), Cronbachs Alpha (≥ 0.6) dan Composite Reliability (≥ 0.7).

Demikian pula pengujian terhadap kelayakan model, nilai t-statistik (t-hitung) lebih besar nilai t-tabel. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan $n = 93$ diperoleh t tabel sebesar = 1,98761 sedangkan t hitung hasil olah data dapat dilihat pada model diatas adalah 2,891 untuk pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 1,902 untuk pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan 4,003 untuk penerapan akuntansi publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian 3,259 untuk ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya 2,433 untuk system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable selain pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun hasil uji t ini dapat juga dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15.

Hasil Uji T Statistik

Variabel	Original Sample	Mean	Standard Error	T Statistics	P Values
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,135	0,132	0,047	2,891	0,004
Pengendalian Akuntansi	0,110	0,098	0,058	1,902	0,058
Penerapan Akuntansi Publik	0,244	0,232	0,061	4,003	0,000
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0,300	0,289	0,092	3,259	0,001
Sistem Pelaporan	0,296	0,327	0,122	2,433	0,015

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan table diatas diketahui nilai t statistik masing – masing variabel lebih besar dari nilai t table untuk $n = 93$ diperoleh (lebih besar dari 1,98761) untuk variabel kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan perundangan, dan system pelaporan. kemudian dilihat dari nilai p value yang semuanya dibawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan.

4.3. Pembahasan

Penelitian ini mengembangkan lima hipotesis terkait yaitu:

- Hipotesis 1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung.
- Hipotesis 2: Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung.
- Hipotesis 3: Penerapan akuntansi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung.
- Hipotesis 4: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung.
- Hipotesis 5: Sistem pelaporan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung.

Kelima hipotesis ini diuji dengan menggunakan alat analisis SEM berbasis PLS, setelah diperoleh keyakinan atas validitas dan reliabilitas instrumen untuk memperoleh nilai variabel penelitian. Selanjutnya dijelaskan hasil pengujian statistik untuk masing-masing hipotesis penelitian.

4.3.1 Pengujian hipotesis pertama

Hipotesis 1 yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung. Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Artinya hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah (2004), Herawaty (2011), Anjarwati (2012), Cefrida, dkk yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian aparatur yang terlibat dalam penyusunan anggaran di pemerintahan daerah harus lebih cermat agar kejelasan sasaran anggaran lebih optimal.

4.3.2 Pengujian hipotesis kedua

Hipotesis 2 yang menyatakan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung. Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Artinya hipotesis kedua ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Anjarwati (2012), Cefrida, dkk (2014) yang menyatakan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja. Menurut definisi Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk

mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan (Mulyadi, 2008). Meskipun pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung, namun pengendalian akuntansi mesti tetap dikendalikan karena pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak syah.

4.3.3 Pengujian hipotesis ketiga

Hipotesis 3 yang menyatakan penerapan akuntansi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung. Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa penerapan akuntansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Artinya hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pamungkas (2012) dan Jannaini (2013) yang menyatakan penerapan akuntansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kehadiran akuntansi sektor publik memang sangat penting dalam pembuatan laporan yang terkait dengan transaksi dan kegiatan keuangan pada lingkup pemerintahan. Peranannya yang penting ini juga tercantum dan didukung dasar hukum yang jelas seperti UUD 1945 amandemen IV yang menjelaskan keuangan negara, UU nomor 5 tahun 1974 pasal 64 (Fungsi APBD), dan lainnya. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang baik dalam penerapan akuntansi publik agar berjalan sesuai dengan rencana.

4.3.4 Pengujian hipotesis keempat

Hipotesis 4 yang menyatakan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung. Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa

ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Artinya hipotesis keempat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zirman,dkk (2010), Riantiarno dan Azlina (2011), Pamungkas (2012) yang menyatakan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Attamimi dalam Rasjidi (2004) memberi batasan peraturan perundangan adalah peraturan negara, yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.

Peraturan perundangan diciptakan untuk menjaga agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, karena itu perlu dilakukan pengawasan guna memastikan ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat betul-betul dilaksanakan, dan dilakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

4.3.5 Pengujian hipotesis kelima

Hipotesis 5 yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung. Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Artinya hipotesis kelima diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Abdullah (2004), Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) yang menyatakan system pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Mardiasmo (2009), “Lembaga pemerintah di tuntutan untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau

dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdulah, 2005).

Melalui penerapan sistem pelaporan yang baik tentu semakin dapat meminimalisir peluang-peluang terjadinya kecurangan, sehingga semakin mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan.